

## TAJUK RENCANA

### Memidanakan Parpol Pencatut Nama Warga?

**PENCATUTAN** nama warga dalam dukungan partai politik (parpol) sejatinya merupakan 'kisah lama'. Namun peristiwa ini masih terus berulang dalam setiap verifikasi parpol oleh KPU, pascareformasi. Mengingat memang tidak mudah mendapatkan dukungan. Paling tidak, untuk tingkat kabupaten/kota perlu seperseribu jumlah penduduk kota/kabupaten, dalam wujud photocopy KTP. Bagi sebuah partai baru, ini bukan hal gampang, karena warga 'sudah terkepung' partai politik yang tumbuh bak cendawan di musim hujan.

Kala temuan KPU diklarifikasi, rata-rata warga merasa kaget, bingung bahkan ada yang takut. Apalagi kalau memiliki pekerjaan yang menyaratkan tidak boleh menjadi anggota parpol. Kekhawatiran bila temuan itu akan berakibat bagi pekerjaan, tentu menggelayuti benak. Tak heran bila seperti terjadi di Kabupaten Gunungkidul, terdapat 43 warga yang mengadu karena namanya dicatut. Yang membuat miris, yang dicatut bahkan bukan penduduk Gunungkidul. (KR, 14/11).

Kian miris, ketika pencatutan nama warga tersebut hampir terjadi di pelbagai wilayah di negeri ini. Dan strategi KPU melakukan *door to door* dalam melakukan klarifikasi merupakan wujud dan kerja keras yang pantas diapresiasi. Kian memrihatkan, ketika KPU menemukan ada parpol yang memanfaatkan 98 anggota KPU daerah tanpa seizin yang bersangkutan. Dalam konferensi pers di Jakarta, 7 Agustus silam Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, jika terbukti parpol mencatat nama seseorang tanpa izin maka ada dua kemungkinan. Parpol tersebut akan dikenai hukuman administrasi atau hukuman pidana. Bahkan parpol terancam mendapat predikat tidak memenuhi syarat (TMS). Apalagi bila hal ini diingkari warga yang dicatut namanya, saat verifikasi faktual.

Memang ada warga yang dengan kesadaran mengadakan pencatutan

nama tersebut ke Bawaslu. Alasan kekhawatiran terkait pekerjaan, lebih rasional. Selain tentu saja, menyurutnya kepercayaan warga terhadap partai politik. Bisa dipahami, survei Indopol menunjukkan 35,93% atau sepertiga responden tidak percaya kepada parpol. Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto Juli lalu menyingkap pada media, ketidakpercayaan itu akibat partai tidak mampu menampung aspirasi warga (26,64%). Sementara, 11,76% warga menilai parpol telah kehilangan ideologi dan integritas.

Membuat warga 'melek politik' dengan mengecek namanya, perlu diajarkan agar pencatutan nama tidak menjadi sebuah bayang-bayang gelap demokrasi. Apalagi pengnyanaan dokumen dan tanpa hak izin orang yang bersangkutan, dalam konteks hukum pidana, termasuk kategori pemalsuan dokumen. Karenanya sudah masuk ke ranah pidana, perlu juga ada kesadaran sekaligus keberanian melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Mungkin diperlukan lembaga yang bisa dan bersedia mendampingi sekaligus mengedukasi masyarakat akan hal itu. Karena korban pencatutan nama ini acap kali enggan melapor, kalau tidak ada kaitan dengan pekerjaan yang menyaratkan tidak berafiliasi dengan parpol.

Realita ini tentu tidak bisa dibiarkan berulang terjadi, dan menjadi fenomena tidak sehat dunia politik Indonesia, setiap akan verifikasi parpol. Artinya, upaya pencatutan nama harus dihentikan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Mungkinkah bisa diusulkan dengan perubahan undang-undang pemilu yang ada? Seperti dikemukakan Direktur Dignity Indonesia Jefry Adriansyah pada media Sabtu (12/11) lalu agar DPR merevisi UU Pemilu dan memuat sanksi tegas bagi partai yang melakukan pencatutan. Sanksinya bisa berupa didiskualifikasi sebagai calon peserta pemilu apabila ketahuan melakukan pencatutan. Mungkinkah oh mungkinkah...? □ - d

## Migrasi Siaran Televisi, 'Go Digital'

**TANGGAL** 2 November pemerintah secara serentak menghentikan siaran televisi analog atau Analogue Switch Off (ASO) disebut juga dengan transisi televisi digital. Adalah suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi ke dan digantikan televisi digital. Penghentian siaran analog sesuai amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peralihan dari siaran televisi analog ke digital, akan meningkatkan baik kualitas teknis, konten maupun suara yang semakin baik. Berkat polesan teknologi digital siaran televisi semakin *fashionable*, karena menghasilkan siaran dengan kualitas gambar dan warna beresolusi tinggi. Akan membawa pemirsa betah berlama-lama menonton tayangan televisi digital tersebut.

### Mengapa Harus Digital?

Sebagian masyarakat kita tidak memahami alasan migrasi dari siaran analog ke digital. Menurut survei yang dilakukan Litbang Kominfo tahun 2019, 66% masyarakat Indonesia mengakses siaran televisi dengan tv analog. Adapun pendorong utama pengembangan televisi digital di Indonesia ialah pasar televisi analog yang telah mulai jenuh. Serta tuntutan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sudah serba digital.

Migrasi tv analog ke tv digital semakin menegaskan kebenaran prediksi dan analisis Alfin Toffler yang menyatakan bahwa saat ini kita telah memasuki gelombang ketiga dari tahapan perkembangan masyarakat yakni masyarakat informasi yang ditandai oleh isu-isu digitalisasi.

Saat pandemi memang mengharuskan kita bekerja dengan digital, namun tujuannya untuk membatasi tatap muka dan mobilitas sosial masyarakat. Era pandemi menjadi sebuah pengalaman berharga bagi masyarakat dalam hal penggunaan atau penguasaan perangkat digital. *Work from home* merupakan momentum awal untuk proses sosialisasi

### Tommy Suprpto

digital. Sehingga perubahan perilaku dari komunikasi *offline* menjadi komunikasi *online* tidak banyak menghadapi kendala yang berarti. Karena masyarakat telah 'terseting' perilaku budaya digital yang dibentuk situasi dan kondisi pandemi pada saat itu. Seharusnya masyarakat se-



KR-JOKO SANTOSO

makin siap untuk *go-digital*

Masa pandemi telah mempercepat proses budaya digital serta memberikan hikmah bagi kita semua agar terampil dalam penggunaan peralatan digital. Penguasaan terhadap teknologi digital terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan tanpa gangguan.

### Fondasi Akselerasi

Paul Virilio dalam *Information Bomb* (2000) berpendapat bahwa 'prosedur digital, instrumental' menjadi fondasi akselerasi realitas dari revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang membawa efek globalisasi digital. Yaitu kecepatan terhadap kekuasaan, strategi militer, sosial-budaya dan ekonomi. Akselerasi realitas dari revolusi TIK seperti dikedukakan Virilio telah memunculkan kon-

## Muktamar Orang-orang Bersahaja

### Diko AR Primadi

**GELAR** Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Sala tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan dilakukan tuan rumah untuk menyelesaikan hajjat besar Muhammadiyah tersebut. Mulai dari penyiapan segala sarana dan prasarana bagi peserta dan pengembira yang diprediksi akan berjumlah jutaan.

Acara pra-Muktamar seperti pertunjukan seni dan budaya, talkshow yang dipandu presenter ternama Najwa Shihab sudah dilaksanakan. Tinggal acara inti yang rencananya dibuka Presiden Jokowi. Selain tentu pemilihan formatur Pimpinan Pusat dan Ketua Umum Muhammadiyah periode baru. Sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari momentum yang ditunggu-tunggu warga Persyarikatan.

Walau begitu, jika dalam sebuah kompetisi, ada saja kelompok yang tidak mau menerima atau mengakui kekalahan. Pada kompetisi politik misalnya, di negara yang menyajikan dua pasangan calon atau lebih, kerusuhan sering kali terjadi. Pihak yang kalah merasa dicurangi dan pihak yang menang berdalih telah mematuhi aturan yang berlaku. Pemandangan seperti ini sudah sangat lazim terjadi. Namun Muktamar Muhammadiyah, ini bukan peristiwa politik. Tidak ada kompetisi apalagi tidak mengakui kemenangan yang lain.

### Perjalanan Panjang

Salah satu hal yang menarik dalam muktamar adalah pemilihan pimpinan. Dalam hal ini Muktamar Muhammadiyah & Aisyiyah telah melalui perjalanan panjang. Pada Muktamar tahun 1990, Panitia Pemilihan harus berhadapan dengan adanya selisih penghitungan suara. Hal ini menyebabkan penghitungan suara harus diulang dua kali. Inipun tidak membuat suasana panas.

Belajar dari pengalaman tersebut, pada tahun 1995 yakni di Muktamar Aceh, ada inisiatif untuk menggunakan sistem peng-

hitungan menggunakan program Lotus. Selanjutnya pada Muktamar 2000 di Jakarta panitia menggunakan penghitungan suara dengan program Excel. Kemudian 2005 di Malang dengan dibantu tim IT pemilihan semakin mudah dengan dibuatnya sistem penghitungan suara *e-counting* - pemilihannya manual tetapi penghitungannya melalui sistem teknologi.

Dengan kemajuan teknologi saat ini membawa Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyiyah menggunakan *e-voting*. Sistem *e-voting* menjadikan proses pemilihan dan penghitungan suara menjadi lebih ringkas dan cepat serta meminimalisir kecurangan dengan penerapan teknologi.

Singkatnya, dengan alasan pemanfaatan teknologi, kekhawatiran akan terjadi kecurangan di tubuh persyarikatan setidaknya merupakan kecemasan yang bisa dibilang berlebihan dan tidak memiliki dasar yang jelas. Sehingga dalam forum Tanwir Muhammadiyah Jilid II tahun lalu kekhawatiran tersebut dijawab secara lugas bahwa kekhawatiran tidak diperlukan dalam bermuhammadiyah. Karena sepanjang perjalanan persyarikatan, tidak pernah ada kasus perebutan jabatan dan kedudukan, apalagi kasus kecurangan: memanipulasi data pemilihan.

### Bercermin dari Sesepeh

Kita dapat bercermin dari para sesepeh dan pimpinan terdahulu yang tidak pernah mengajukan dirinya, namun dipilih di dalam sebuah sidang (Tanwir/Muktamar). Artinya,

vergensi komputer, internet dan media, yang telah mengubah *life style* masyarakat dalam budaya komunikasi. Momentum pandemi menyebabkan akselerasi realitas digital semakin masif yang mempercepat perubahan dari *media traditional cultures* menjadi *media digital cultures*.

Persoalan pokok dalam akselerasi realitas digital, masyarakat harus membuka diri dengan perkembangan dan dinamika media baru yang serba digital tersebut. Masyarakat harus bisa mengadaptasi dan mengadopsi pikiran pikiran dan gagasan masyarakat baru yang ditopang kekuatan dan ekspansi ekonomi jaringan sistem informasi global yang didukung teknologi. Sehingga masyarakat dalam menghadapi realitas digital saat ini perlu didorong kesiapan mereka terhadap sikap *comformity* terhadap *media digital cultures*.

Dengan budaya ini kehadiran teknologi baru, ditangkap, dimaknai dan dipergunakan, sangat tergantung pula pada bagaimana dinamika struktur dan kultur masyarakat yang ada. Artinya jika kehadiran teknologi digital sudah terkompromitas pada budaya mereka, kecenderungan masyarakat untuk berubah akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya migrasi televisi analog ke digital yang menjadi kebijaksanaan pemerintah akan diterima baik. □ - d

**\*Drs Tommy Suprpto MS, Pengamat dan pemerhati media dan komunikasi, Dosen LB STMM-MMTC Yogyakarta.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### LKS Mitra Amanah Bangun Gedung Panti

**LEMBAGA** Kesejahteraan Sosial Penyantun Yatim Piatu 'Mitra Amanah' yang beralamat di Dusun Suruhan RT 05 Timbulharjo Sewon Bantul, Insya Allah segera melanjutkan pembangunan gedung panti. Gedung panti akan digunakan untuk menampung anak yatim piatu yang menjadi asuhan dari LKS Mitra Amanah.

Pembangunan itu masih banyak kekurangan dana. Maka kami, Panitia Pembangunan Gedung Panti Mitra Amanah mengetuk hati para pembaca setia SKH Kedaulatan Rakyat untuk memberikan dukungan dan bantu-

an. Baik berwujud dana maupun material, sehingga pembangunan gedung panti bisa segera terlaksana. Sumbangan bisa diserahkan langsung ke lokasi pembangunan gedung panti asuhan atau melalui: Bank Syariah Indonesia. Nomor Rekening: 3110324960 a/n YATIMAN.

Atas dukungan serta bantuan dari para pembaca setia SKH Kedaulatan Rakyat kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan panjengannya sekalian. Aamiin.

**Panitia Pembangunan Gedung Panti Asuhan Mitra Amanah**

### Promo 'Harga Sesuai Kantong Mahasiswa'

**MESKI** sudah semakin jarang, di Yogyakarta kadang masih dijumpai warung atau bahkan rumah makan yang menuliskan promosinya dengan tulisan 'harga kantong mahasiswa'. Promo yang membuat tanya, berapakah 'harga kantong mahasiswa' tersebut?

Karena sekarang ini 'kantong mahasiswa' tentu sudah sangat berbeda dengan mahasiswa tahun 80-an. Dulu mahasiswa tahun 80-an kuliah dengan kiriman pas-pasan adalah pemandangan biasa. Makan 'nge-

bon' di warung pun adalah biasa. Kalau kini? Setiap siang - sore yang namanya *café* dipenuhi dengan mahasiswa. Ada yang rapat, ada yang mengerjakan tugas, ada yang *ngedate*, ada yang sekadar kumpul-kumpul.

Tentu mereka tidak sekadar numpang duduk kan? Sekadar beli minum dalam rapat dan gantian yang beli supaya bisa terus duduk di situ sembari rapat atau mengerjakan tugas? Jadi, berapakah 'harga sesuai kantong mahasiswa' sekarang?

**Edi, Jl Kaliurang KM 14 Sleman.**

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)